

Perihal Permohonan yudicial review  
UU No. 3 Tahun 2022  
perpindahan IKN

Kepada Yth  
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibukota Negara,  
Saya sebagai Pengamat Sosial dan Hukum dan warga negara Indonesia :

Nama : Sugeng SH  
No. KTP : 3671122310490001  
Tempat/ tanggal lahir : Pekalongan/ 23 Oktober 1949  
Alamat : Ciledug indah 1, Jalan Telaga 4 Blok BXX No 296 RT.12/06  
Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah  
Kota Tangerang – Banten

Mengajukan yudicial review secara formil dan materil Undang – Undang No. 3 Tahun 2022  
tentang perpindahan ibukota negara.

Sifat pengajuan perorangan.

Dasar hukum

Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 Hak warga negara untuk turut membangun masyarakat,  
bangsa dan negaranya.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji  
undang – undang terhadap UUD 1945.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

REGISTRASI	
NO.	39../PUU-...XX...../2022
Hari	.....Selasa.....
Tanggal	.....15.....Maret.....2022
Jam	.....10.00 WIB.....

Dengan alasan sebagai berikut:

### 1. Secara formil

Kota Jakarta sebagai ibukota negara merupakan simbol kehormatan, kebanggaan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta mempunyai sejarah panjang dengan berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian pembahasan RUUnya, selain harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, tidak terburu – buru serta mendengar/ di diskusikan dengan pejabat pemda, pimpinan ormas, tokoh masyarakat Jakarta dan daerah penyangga. Pansus IKN DPR lebih banyak diskusi/ publikasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur. DPD seharusnya dilibatkan untuk membahas RUU IKN sesuai dengan pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

RUU IKN disampaikan Presiden ke DPR tanggal 29 September. Pembahasan di Badan Musyawarah DPR tanggal 03 November 2021. Rapat DPR untuk menetapkan Anggota pansus DPR tanggal 07 Desember 2021 kemudian dilakukan pembahasan tingkat 1 dan besoknya pansus IKN DPR melakukan dengar pendapat umum dengan para ahli dan berbagai disiplin ilmu. Seharusnya kegiatan ini dipublikasikan di media TV atau surat kabar.

RUU IKN disetujui DPR menjadi undang – undang pada sidang paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian pembahasan RUU IKN sangat terburu – buru lebih kurang 40 hari.

### 2. Alasan materil

- a. Kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi covid-19 yang telah banyak membawa korban jiwa hingga ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang dirawat dirumah sakit serta membawa dampak buruk berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini berkembang varian baru omicron yang menurut para ahli kesehatan dinilai lebih cepat penularannya dan mempunyai gejala ringan. Untuk mengatasi covid 19 dan dampaknya memerlukan biaya yang besar dan tindakan yang prioritas. Tunggakan pemerintah/ BPJS kondisi sekarang masih menunggak Rp. 25 Triliun untuk penanganan Covid-19 ( Berita media Metro TV tanggal 15 Feb 2022 )
- b. Hutang pemerintah kinimencapai Rp. 6.687 triliun (Berita Kompas TV tanggal 29 September 2021) serta kewajiban membayar bunga hutang pemerintah setiap tahunnya sangat besar. Pemerintah sudah banyak menjual surat hutang negara, baru – baru ini akan melelang surat hutang negara senilai Rp. 25 Triliun (Berita News TV tanggal 03 Februari 2022)
- c. Bencana alam ( gempa bumi, Meletus/ erupsi gunung berapi, banjir, longsor, badai, kebakaran hutan dan wabah penyakit masih banyak terjadi di Indonesia yang merugikan dan membawa korban jiwa harta penduduk/ negara yang penanganannya lebih prioritas.

- d. Dalam rangka modernisasi/ alutista TNI untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI serta sebagai kekuatan yang disegani dikawasan Asia, maka Indonesia dengan Perancis mengadakan kesepakatan untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale secara bertahap, 6 pesawat direalisasikan sampai tahun 2024. Kemudian dari Amerika direncanakan akan membeli 36 pesawat tempur F15 yang memerlukan biaya triliunan rupiah. Modernisasi alutista TNI lebih prioritas daripada untuk biaya pemindahan ibukota baru. sepanjang dilakukan bertahap sesuai anggaran yang ada dan sesuai kebutuhan..
- e. Pengeluaran anggaran pendidikan nasional sekurang kurangnya 20% yang ditetapkan APBN perlu perhatian serius mengingat banyak daerah – daerah yang sarana dan fasilitas pendidikannya belum memadai, banyak tenaga honorer pengajar yang belum diangkat sebagai pegawai tetap/ gaji rendah.
- f. Pengeluaran anggaran negara untuk pemilu serentak Pilkada, Pilpres, pemilu legislative tahun 2024 sangat memerlukan biaya ratusan triliunan rupiah, belum lagi ancaman/ resiko/ konflik pemilu masih besar. Apabila para pemimpin bangsa lebih mengutamakan/ mmbela kepentingan pribadi/ kelompoknya tidak mengutamakan persatuan bangsa dan negara, kepentingan rakyat maka tidak mustahil bangsa dan negara bisa terjadi tragedi seperti di Yaman, Suriah, Afganistan dan banyak negara Afrika dari negara yang tadinya kuat dan kaya menjadi lemah, terpuruk dan rakyatnya menderita.

Peralihan kekuasaan negara harus dilakukan secara konstitusional agar Indonesia menjadi negara besar, maju dan sejahtera.

- f. Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan akan beresiko,
- Rusaknya lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dsb. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru - paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia.
  - Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibukota pindah ke Kalimantan.
- g. Beberapa BUMN Indonesia mengalami kerugian besar / bermasalah antara lain PT Garuda Krakatau Steal, Jiwasraya, Asabri yang perlu penanganan serius
- h. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional sulit terwujud mengingat banyak anggaran negara terserap untuk mengatasi pandemic Covid 19 beserta dampaknya, bencana alam serta beban pemerintah yang telah saya sebutkan di atas, apalagi kalau ditambah biaya untuk pembangunan ibukota baru dan kegiatan terkait lainnya.

i. Dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga, antara lain terancam:

- Banyak tenaga kerja kontrak, honor tenaga keamanan, cleaning service, pegawai parkir, pedagang serta karyawan kantin di kementerian/ lembaga negara akan kehilangan pekerjaannya.
- Banyak pula pejabat/ pegawai ASN yang terpisah dengan suami istri/ anaknya karena masih harus menyelesaikan Pendidikan, bekerja pada perusahaan swasta dan pertimbangan lainnya
- Aset negara berupa gedung kantor, bangunan, dan barang lainnya apabila dipindah tangankan tentu nilai/ harganya akan rendah.

Merubah paradigma agar tidak Jawa centries tidak harus dengan memindahkan ibukota negara yang memerlukan biaya besar triliunan rupiah, ditengah beban negara yang besar/ berat. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan dapat dilakukan dengan memajukan daerah, membuat/ meningkatkan centra industry, ekonomi, sosial dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya.

- Tuntutan

Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Pindahan Ibukota Negara.

Demikian yudicial review yang saya ajukan, untuk dapat dikabulkan.

Tangerang, 23 Februari 2022  
Semchon  
  
Sugeng SH